

Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Pembinaan Dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Di Kabupaten Minahasa Selatan

*Regina Aprilia Medellu*¹

*Sarah Sambiran*²

*Donald K. Monintja*³

Email Korespondensi: reginamedellu083@student.unsrat.ac.id

Abstrak

Tujuan dalam penelitian ini adalah Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pembinaan dan pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Minahasa Selatan. Organisasi merupakan kesatuan sosial yang di koordinasikan secara sadar dengan batasan yang reaktif, bekerja terus-menerus untuk mencapai tujuan. Organisasi juga berisikan orang yang mempunyai aktivitas yang jelas guna mencapai tujuan organisasi tersebut. Pada era saat ini eksistensi organisasi kemasyarakatan sudah sangat mengalami perkembangan yang sangat pesat di setiap daerah di seluruh Indonesia. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa belum maksimalnya kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik karena kurangnya komunikasi antara Ormas, Masyarakat dan instansi sehingga ada Ormas yang saat ini sudah jarang aktif bahkan ada masyarakat yang belum merasakan langsung hasil kinerja dalam bentuk pembinaan dan pemberdayaan, masih kurangnya perhatian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengenai keluhan juga aspirasi yang di sampaikan masyarakat dan ormas perlu adanya respon yang baik oleh instansi.

Kata Kunci: *Kinerja, Kesbangpol, Pembinaan, Pemberdayaan, Ormas*

¹ *Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat*

² *Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat*

³ *Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat*

Sekretariat:

Gedung H6.2.2. Fispol Unsrat

Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado

Pendahuluan

Pada era saat ini eksistensi organisasi kemasyarakatan sudah sangat mengalami perkembangan yang sangat pesat di setiap daerah di seluruh Indonesia. Namun keberadaan sebagian ormas saat ini juga mulai banyak mendapat kritikan karena aktifitas serta kegiatan yang dijalankannya sedikit menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang organisasi kemasyarakatan serta landasan, aturan main, dan tujuan organisasi kemasyarakatan itu sendiri.

Pada saat beberapa kegiatan-kegiatan organisasi kemasyarakatan yang dianggap menyimpang dari ketentuan peraturan conothnya Organisasi kemasyarakatan banyak yang terlibat aktif dalam kegiatan kegiatan partai politik, banyak organisasi kemasyarakatan yang sudah tidak aktif, Seringnya terjadi konflik di internal organisasi serta konflik antar organisasi kemasyarakatan contoh Demo tentang tuntutan sumber perekonomian masyarakat yakni Captikus yang tidak memiliki legalitas sehingga terjadi kerusuhan yang mengakibatkan perkelahian dari beberapa anggota organisasi dengan oknum polisi, sehingga masih ada saja konflik sosial yang terjadi.

Hal inilah yang menyebabkan sebagian organisasi kemasyarakatan saat ini kurang mendapat simpatik dari masyarakat karena dianggap sudah keluar dari koridor serta fungsinya sebagai oraganisasi kemasyarakatan yang diharapkan mampu menjadi fasilitator serta kontributor dalam memberikan solusi dan memecahkan persoalan kesejahteraan di masyarakat. Seperti halnya organisasi kemasyarakatan di kabupaten Minahasa Selatan yang pada prinsipnya di awasi lembaga teknis daerah yakni Badan Kesatuan Bangsa, Politik, sehingga terjadi keseimbangan serta kerja sama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan ormas.

Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia. Kondisi organisasi kemasyarakatan yang ada di kabupaten minahasa selatan saat ini masih belum terorganisir dengan baik karena masih

banyaknya organisasi kemasyarakatan yang belum mendaftarkan diri secara kelembagaan kepada Badan Kesatuan Bangsa, Politik.

Pembinaan dan pemerdayaan ormas sangatlah penting untuk mengatasi konflik yang timbul akibat banyaknya partai politik dan organisasi masyarakat yang ada dan pentingnya menanamkan kesadaran yang seimbang dalam diri masyarakat sebagaimana yang dituntut oleh sistem demokrasi pancasila dan bagaimana menciptakan suatu mekanisme politik yang dapat menjaga kestabilan politik maka dari uraian di atas dapat menarik minat peneliti untuk lebih lanjut mengetahui bagaimana Kinerja Badan Kesatuan dan Politik dalam pembinaan dan pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Minahasa Selatan.

Dalam jurnal penelitian Chandra (2022) dengan judul Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Pembinaan dan Penertiban Organiasasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat Dikota Cimahi Provinisi Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Cimahi dalam melakukan oembinaan dan penertiban terhadap organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat telah bekerja dengan optimal. Komunikasi dan juga pendekatan yang dilakukan anatra Badan Kesbang dengan Ormas dan LSM menjadi faktor utama dalam keberhasilan pembinaan dan penertipan ormas dan LSM yang ada di kota Cimahi

Dalam jurnal penelitian Tisya (2020) dengan judul Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Pembinaan Keamanan Masyarakat Di kota Bontang dari hasil penelitian, penyajian data dan pembahasan Kinerja Badan Kesbangpol . Dalam Pembinaan Keamanan Kepada Masyarakat Dikota Bontang sudah cukup baik kualitas pegawai dalam berka sesuai dengan kemampuan dan ketrampilannya, kerja sama yang dilakukan pegawai dalam melakukan pembinaan keamanan masyarakat pegawai selalu interaktif dalam komunikasi dan dengan sikap saling menghormatidari tingginya partisipasi masyarakat tersebut.

EKSEKUTIF

Volume 3 No. 2 Tahun 2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif. Fokus penelitian ini adalah bagaimana Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Pembinaan dan Pemberdayaan Ormas di Kabupaten Minahasa Selatan. Dengan menggunakan teori dari Agus Dwiyanto yang meliputi 5 indikator yaitu:

1. Produktivitas Kerja
2. Kualitas
3. Responsivitas
4. Responsibilitas
5. Akuntabilitas

Teknik Pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk menganalisa berbagai fenomena di lapangan, langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut: Pengumpulan informasi melalui wawancara, observasi langsung dan dokumentasi; Reduksi data Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, dan Penyajian data Setelah data direduksi dan kesimpulan.

Pembahasan

1. Produktivitas

Produktivitas kerja menurut agus dwiyanto (2016 hanya mengukur tingkat efisiensi tetapi juga mengukur efektifitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dan output. Konsep produktivitas ini kemudian dirasa terlalu sempit dan general Accounting Office (GAD) mencoba mengembangkan suatu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang didapatkan yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting.

Berdasarkan hasil penelitian dengan beberapa informan yang merupakan unsur penilai peneliti melihat adanya berbagai perbedaan pendapat mengenai hasil kerja yang diberikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Selatan yang masih kurang maksimal dalam menjalankan tugas kerja karena ada ormas yang saat ini sudah jarang aktif bahkan pun sudah tidak ada komunikasi, adapun masyarakat yang tidak tau apa kerja dari Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik dikarena tidak adanya kegiatan di lapangan. Tetapi ada ormas yang menilai baik kinerja dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik tapi perlu juga untuk meningkatkan kinerja.

Berdasarkan hasil penelitian dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Selatan hasil kerja sampai saat ini sudah maksimal dengan adanya pengawasan kepada ormas yang adanya dan juga adanya pendidikan politik yang sesuai dengan undang-undang, tetapi juga memiliki kendala 2 tahun terakhir ini yaitu pandemi covid19 dan juga masalah penganggaran

2. Kualitas Layanan

Menurut Agus Dwiyanto (2016) Isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima organisasi publik. Dengan demikian kepuasan masyarakat terdapat layanan dapat menjadikan indikator kinerja organisasi publik.

Berdasarkan hasil penelitian dengan beberapa informan yang merupakan unsur penilai peneliti melihat adanya beberapa perbedaan pendapat ,masyarakat yang belum merasa puas dan merasakan langsung dengan pelayanan karena belum ada kegiatan pembinaan dan pemberdayaan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Minahasa Selatan adapun ormas yang merasa sudah puas dengan pelayanan yang di berikan ketika merka mendaftar dan melakukan kegiatan yang direpon baik oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.

Berdasarkan hasil penelitian dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Selatan tentang pelayanan yang maksimal kepada masyarakat berupa pengawasan juga membuka link pendaftaran ormas agar mempermudah masyarakat tuntut mendaftar sesuai dengan peraturan yang ada oleh karena itu Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik melakukan pengawasan agar tidak ada ormas yang keluar dari peraturan yang ada.

3. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dengan informan yang merupakan unsur penilai peneliti melihat ada ormas dan masyarakat yang merasa kurang maksimalnya respon yang di berikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Selatan ketika penyampaian aspirasi bahkan keluhan yang disampaikan belum di perhatikan dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Selatan ada beberapa program kerja berupa kegiatan sosialisasi, pembinaan, dan pemberdayaan yang 2 tahun belakangan ini terhalang karena adanya pandemi covid19s sehingga terhalang melakukan interaksi dengan masyarakat dan membatasi berkegiatan diluar. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik saat ini pun menerima dengan baik segala keluhan, saran, kritikan yang kemudian harus di sesuaikan dengan undang-undang yang ada dan juga berusaha menyampaikan kepada pimpinan.

4. Responsibilitas

Menjelaskan pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas.

Berdasarkan hasil penelitian dengan informan yang merupakan unsur penilai peneliti melihat ada berbagai perbedaan pendapat mengenai kebijakan dan pembinaan sudah baik tetapi perlu di perhatikan lagi, juga perlu adanya kegiatan untuk membangun masyarakat untuk mencegah terjadinya konflik.

Berdasarkan hasil penelitian dengan Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Minahasa Selatan tentang kebijakan dalam program kerja bisa di pertanggung jawabkan karena sampai saat ini

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik menjalankan setiap program terencana dan sesuai dengan peraturan yang ada.

5. Akuntabilitas

Akuntabilitas publik merujuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Kinerja organisasi publik tidak hanya dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah seperti pencapaian target, tetapi juga harus dinilai dari ukuran eksternal seperti nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dengan informan yang merupakan unsur penilai peneliti melihat adanya perbedaan pendapat ada masyarakat dan ormas saat ini merasa belum di jangkau oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Minahasa Selatan karena kurangnya informasi dan pengetahuan bagaimana tugas kerja oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Berdasarkan hasil penelitian dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Selatan mengenai kebijakan setiap tahun melakukan verifikasi pengawasan terhadap ormas yang aktif dan tidak aktif dan juga terhadap ormas yang radikal tetapi sampai saat ini kabupaten minahasa selatan belum terdeteksi adanya ormas yang radikal dan saat ini yang sudah mendaftar atau melapor yaitu ormas yang berasaskan pancasila.

Penutup

Kesimpulan

1. Produktivitas

Peneliti melihat bahwa belum maksimalnya kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik karena kurangnya komunikasi antara Ormas, Masyarakat dan instansi sehingga ada Ormas yang saat ini sudah jarang aktif bahkan ada masyarakat yang belum merasakan langsung hasil kinerja dalam bentuk pembinaan dan pemberdayaan, ada juga yang menjadi kendala dalam kinerja berupa masalah penganggaran yang terbatas itu mengurangi maksimalnya kegiatan yang terlebih khusus dalam melakukan kegiatan berupa pembinaan dan pemberdayaan.

EKSEKUTIF

Volume 3 No. 2 Tahun 2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

2. Kualitas layanan

Peneliti melihat bahwa pelayanan yang sudah di berikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sudah baik khususnya pelayanan berupa pendaftaran online yang sudah lebih mudah di akses juga sosialisasi langsung ketika ormas datang mendaftar, tetapi juga ada ormas yang kurang merasa puas karena belum ada kegiatan berupa pemberdayaan.

3. Responsivitas

Peneliti melihat bahwa masih kurangnya perhatian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengenai keluhan juga aspirasi yang di sampaikan masyarakat dan ormas perlu adanya respon yang baik oleh instansi.

4. Responsibilitas

Peneliti melihat bahwa kebijakan yang sudah di berikan Badan Kesatuan Bangsa dan politik yang terencana juga sesuai dengan peraturan yang ada. Perlu adanya kegiatan seperti sosialisasi untuk membangun masyarakat agar terhindar dari konflik.

5. Akuntabilitas

Peneliti melihat bahwa masih kurang maksimalnya kegiatan seinggah ada ormas dan masyarakat yang belum di jangkau oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga kurangnya informasi dan pengetahuan bagaimana tugas kerja instansi ini tetapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga sudah melakukan tugasnya dengan baik berupa ada beberapa kebijakan setiap tahun berupa verifikasi pengawasan terhadap ormas seinggah sampai saat ini belum ditemui adanya ormas yang radikal di Kabupaten Minahasa Selatan.

Saran

1. Perlu adanya strategi berupa sosialisasi guna meningkatkan pengetahuan bagi ormas maupun masyarakat. Dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dapat meberikan arahan terkait nilai,norma, dan peran yang ada kepada ormas baik secara langsung ataupun dengan cara tidak langsung
2. Pembinaan dan pemberdayaan yang di lakukan seharusnya tidak hanya bersifat umum saja mamun juga harus adanya peningkatan dari setiap anggota ormas,

peningkatan dari segi ekonomi yang dimana masalah ekonomi juga merupakan masalah yang cukup sering berhadapan dengan Ormas

3. Peningkatan kinerja oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berupa melakukan komunikasi yang baik terhadap ormas memberikan informasi yang cepat dan tanggap, lebih memperhatikan lagi segala keluhan dari Ormas.

Daftar Pustaka

- Adri, Budairi. 2002. Eksistensi Organisasi Masyarakat dan Sejarah Perkembangannya di Indonesia. Jakarta: Gramedia
- Chabib, Soleh, dan Suripto 2011. Menilai Kinerja Pemerintah Daerah. Bandung: fokus media
- Chandara Santika 2020 Peran Badan Kesatuan Bangsa Dalam Pebinaan Dan Penertipan Organiasi Masyarakat Dan Lembaga Swadaya Masyarakat Dikota Chimahi Provinsi Jawa Barat
- Dharma. 2003. Manajemen Kinerja. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Dwiyanto, Agus. 2006. Mewujudkan Good Goverment Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: UGM
- Hartiningih. 2001. Peran Ormas dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Citra Utama: Jakarta
- Lembaga Administrasi Negara-LAN. 2003. Keputusan Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003. Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta
- Mathis, R. dan John, J. 2002. Manejemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Selemb A. Empat
- Miftha Thoha. 1989. Pembinaan Organisasi. Jakarta : Rajawali
- Moleong, J. Lexy. 2017. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Pasolog, H. 2007. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
- Rahmat. A. 2016. Pengawasan Kegiatan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Di

EKSEKUTIF

Volume 3 No. 2 Tahun 2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

Kabupaten Takalar. Skripsi.

Universitas Muhammadiyah Makassar

Simamora, B. 2004. Memenangkan Pasar dengan Pemasaran yang Efektif dan Profitable. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Sugiyono, 2012. Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta

Tisya, A.A . 2020. Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Poltik Dalam Pembinaan Keamanan Masyarakat Di Kota Bontang. Universitas Mulawarman

Widoyoko, E. P. 2014. Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Belajar

Winayanti, K. 2011. Dasar Hukum Pendirian dan Pembubaran Ormas. Yogyakarta: Pustaka Yustisia

Zaili, R. 2012. Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP). Pekanbaru: Universitas Riau

Referensi Lain:

Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Selatan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2013 Pasal 40 Tentang Pemberdayaan Ormas

Peraturan Daerah nomor 23 tahun 2014

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 2016

Website

<https://Minahasa.Selatankab.go.id>Pemilihan Umum.